

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Perdamaian merupakan suatu hal yang menjadi tujuan bersama di tatanan dunia internasional. Banyak negara yang sudah merdeka dan berdaulat setelah sebelumnya pernah dijajah atau bahkan menjajah. Pasca meletusnya perang dunia kedua, negara-negara mulai menyadari bahwasanya banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Oleh karenanya, sejak saat itu banyak aktor baik negara maupun non negara yang menggagas perdamaian. Namun hal tersebut tak sama halnya dengan konflik yang melibatkan Palestina dan Israel. Sejak perang dunia pertama Israel dan Palestina sudah berkonflik untuk memperebutkan wilayah. Melihat konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel memunculkan respon dari berbagai aktor baik aktor pemerintahan maupun non pemerintahan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut merespon konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sebagai negara yang dulunya pernah dijajah tentu membuat Indonesia menolak berbagai konflik dan akan selalu mengupayakan perdamaian termasuk di konflik Israel dan Palestina. Hal tersebut bahkan dengan jelas tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea pertama yang berbunyi “*bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan*”. Tak hanya itu, di alinea ke-empat juga diperjelas bahwasanya Indonesia akan turut ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga tak heran bila selama ini, Indonesia seringkali ikut terlibat aktif dalam setiap aksi perdamaian terhadap berbagai konflik di belahan dunia serta memberikan berbagai bantuan humaniter. Adapun contoh aksi perdamaian yang diikuti oleh Indonesia ialah ketika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaiannya dibawah kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Somalia, Kongo, Kamboja, Iran, Irak dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Indonesia juga turut andil dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan. Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, Indonesia berada di posisi netral yang kemudian dipercayai untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan trilateral ulama yang dihadiri oleh Indonesia, Afghanistan dan juga Pakistan yang kemudian menghasilkan Bogor Ulama Declaration of Peace (CNN Indonesia, 2019). Melihat konsistensi yang dimiliki oleh Indonesia terhadap perdamaian maka tak heran bila Duta Besar Triyono Wibowo selaku wakil tetap RI di PBB mengatakan bahwasanya keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian telah diakui oleh masyarakat Internasional (ANTARANews, 2012). Hal tersebut menandakan bahwasanya di sini Indonesia berada diposisi yang netral terhadap berbagai konflik dengan tujuan menyelesaikan konflik yang ada demi terciptanya perdamaian.

Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik Palestina dan juga Israel. Seperti halnya di era kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia jelas terlihat berpihak kepada Palestina. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai upaya Indonesia di kancah internasional yang selalu dengan tegas menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menolak tawaran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan akan konsisten untuk berada di Pihak Palestina demi kemerdekaannya (Ramdhani, 2022). Penolakan tersebut jelas menunjukkan adanya keberpihakan Indonesia terhadap Palestina dari segi politik seperti enggan untuk menjalin hubungan diplomatik bersama Israel yang bahkan sangat di dukung oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Tak hanya itu, pernyataan Retno Marsudi selaku Menlu di Majelis Umum PBB pada sidang pleno ke-67 juga menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia di Majelis Umum PBB ialah demi keadilan bagi masyarakat Palestina dan masyarakat internasional berhutang kemerdekaan terhadap masyarakat Palestina (Liputan6, 2021). Hal tersebut jelas membuktikan bahwasanya dalam konflik Israel dan Palestina Indonesia tampak tidak netral dan berpihak dengan Palestina.

Oleh karenanya pada penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan keberpihakan kebijakan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui pisau analisis konstruktivisme yang melihat ide sebagai suatu hal

yang lebih penting dan bagaimana negara bertindak tidak berdasarkan kepentingan nasional, namun berdasarkan konteks sosial yang terjadi.

## 1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis mencoba untuk menarik rumusan masalah yaitu: *“Mengapa Indonesia memihak Palestina dalam proses penyelesaian konflik Palestina dan Israel?”*.

## 1. 3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mengapa Indonesia memihak dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana identitas dapat mempengaruhi posisi suatu negara dalam setiap kondisi yang terjadi di tatanan dunia internasional termasuk dalam konflik yang melibatkan negara lain.

## 1. 4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa kegunaan, yakni kegunaan akademis, praktis dan juga sosial.

#### **1. 4. 1 Kegunaan Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya dapat berguna menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan oleh pembaca khususnya dalam menganalisis kaitan antara identitas suatu negara dengan posisi negara tersebut ketika penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam memperluas ilmu hubungan internasional terkait dengan seberapa pentingnya peranan identitas negara dalam mempengaruhi kebijakannya terkhusus dalam penanganan konflik di Palestina dan Israel yang bahkan hingga saat ini masih belum terselesaikan.

#### **1. 4. 2 Kegunaan Praktis**

Dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan pembaca terkait dengan peranan suatu identitas yang dapat mempengaruhi posisi serta kebijakan suatu aktor baik negara maupun non-negara khususnya dalam suatu konflik yang terjadi. Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang dapat langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

### **1. 5 Kerangka Teori**

Penelitian yang akan diangkat pada pembahasan tulisan ini ialah berkenaan dengan Indonesia dan hubungannya dalam konflik Israel serta Palestina. Ditemukan pada hasil kajian pustaka terdapat beberapa penelitian

yang memiliki hubungan dengan poin pembahasan yakni penelitian pertama yang berjudul “Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina” yang ditulis oleh Syarif Bahaudin Modere pada Jurnal CMES Volume 2 Tahun 2019. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana posisi dan peran Indonesia melalui diplomasi untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina dengan menggunakan teori penyelesaian konflik dari Fisher dan juga Perdamaian dari Galtung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah peran yang dilakukan Indonesia berupa menginisiasi kemerdekaan Palestina dengan melakukan penguatan dukungan untuk Palestina di negara Asia-Afrika dan kemudian menjadi fasilitator dari segi bantuan kemanusiaan. Tak hanya itu, Indonesia juga secara konsisten akan mengawal keberlanjutan konflik Israel-Palestina hingga tercapainya perdamaian.

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul “Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina” yang ditulis oleh Hilaria Ananda Wibowo (2017) pada Jurnal Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan Indonesia serta kendala yang dihadapi selama proses perdamaian konflik Israel dan juga Palestina dengan menggunakan teori konflik pelik. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan cara melakukan studi kasus dimana peneliti menyelidiki dengan cermat

suatu kasus yang terjadi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa keterlibatan pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina seperti memberikan dukungan politik dimana Indonesia membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah pada tahun 2016. Kemudian dukungan selanjutnya ialah dalam bidang kemanusiaan seperti memfasilitasi akses kesehatan dan memberikan sejumlah uang untuk kepentingan kemanusiaan. Sedangkan untuk kendala pemerintah Indonesia dalam penelitian ini ialah dikarenakan masalah “trust” dimana pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yang membuat Indonesia sulit untuk membangun proses perdamaian.

Penelitian ketiga yang digunakan berjudul “Analisis Faktor Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019” yang ditulis oleh Bimo Arfino (2020). Pada penelitian ini mencoba untuk membahas bagaimana arah kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor islam dibawah kepemimpinan Joko Widodo periode pertama dengan menggunakan teori konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif-analitis. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah terdapat pengaruh yang kuat dari faktor islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia khususnya di masa pemerintahan presiden Joko Widodo 2014-2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diplomasi middle power yang dilakukan Indonesia sebagai mediator

dalam penanganan konflik Arab Saudi dan juga Iran pada tahun 2016. Berikutnya, Indonesia juga terlibat aktif dalam konflik Rohingya di Myanmar melalui OKI. Dan yang selanjutnya ialah dapat terlihat dari konsistensi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Melihat tinjauan pustaka yang memiliki kaitannya dengan Indonesia dan konflik Israel-Palestina disini maka tiga diantaranya hanya menjelaskan dari satu sisi saja. Seperti pada tulisan Syarif Bahaudin yang menjelaskan dari segi diplomasi kemudian tulisan Hilaria Ananda Wibowo yang hanya melihat dari segi keterlibatannya saja dan terakhir pada tulisan Bimo Arfino dengan melihat dari konteks islam yang dimiliki oleh Indonesia dalam penanganan konflik Israel dan Palestina. Namun disini sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis belum menemukan penelitian yang mencoba untuk mengangkat isu keberpihakan Indonesia kepada Palestina dalam proses penyelesaian konflik Israel-Palestina mengingat secara internasional Indonesia memiliki identitas sebagai negara “peacemaker”.

Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis merasa penelitian mengenai analisis keberpihakan Indonesia dari kacamata identitas terhadap Palestina dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina merupakan celah menarik yang dapat diteliti dengan mengelaborasi kedua konsep yang ada yakni dari segi teori konstruktivisme identitas dan juga teori resolusi konflik. Untuk teori konstruktivisme identitas sendiri akan menggunakan identitas tipe dan juga

identitas peran. Untuk Identitas peran ini sendiri akan dikaitkan dengan teori resolusi konflik yang melihat kenetralan sebagai suatu syarat bagi negara atau pihak ketiga dalam membantu proses penyelesaian konflik.

### **1. 5.1 Teori Konstruktivisme Identitas**

Teori Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI) yang cukup terkenal sejak berakhirnya Perang Dingin. Teori ini muncul ketika teori-teori sebelumnya tidak dapat menjawab peristiwa yang terjadi dalam hubungan internasional. Adapun salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan konstruktivisme ialah Alexander Wendt yang mana ia juga memiliki pandangan yang sama dengan konstruktivis yang lainnya bahwasanya sistem yang ada pada struktur internasional ini adalah sosialnya yang mana itu didasarkan pada identitas mereka yang kemudian menjadi sebuah kepentingan (Bozdaglioglu, 2019: 2). Oleh karenanya, teori ini mengadopsi dasar pemikiran dari teori sosiologi, sehingga membuatnya lebih berfokus menganalisis pada konsep tindakan atau perilaku setiap aktor, serta struktur internasional. Kedua konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain, contoh tindakan atau perilaku setiap individu dapat mempengaruhi perubahan struktur internasional (Rosyidin, 2020: 82). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa asumsi dari konstruktivis adalah segala bentuk peristiwa yang

terjadi di dunia internasional yang anarki ini berdasarkan aktor baik berupa interaksi antar individu atau perilaku setiap individu.

Aktor-aktor yang dimaksud dalam konstruktivis ini bukan hanya aktor negara saja, melainkan aktor *non-state* seperti NGO, dan MNC. Aktor-aktor tersebut akan mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara. Terkait struktur internasional dalam konstruktivisme, dianggap sebagai unsur tidak kasat mata. Struktur internasional dalam konstruktivisme ini tidak mengabaikan peran serta pengaruh dari aspek material seperti kepemilikan senjata peperangan, nuklir, dan militer, namun juga ditambahkan peran serta pengaruh dari aspek non-material seperti budaya, ide/gagasan, serta norma yang kemudian menjadi norma internasional (Dugis, 2016: 149). Hal ini dikarenakan, hubungan internasional tidak selalu berisikan konflik antar negara, namun juga hubungan seperti kerjasama antar aktor dari berbagai negara.

Teori konstruktivisme ini dibagi menjadi dua aliran yaitu aliran konvensional dan aliran kritis. Konstruktivis aliran konvensional ini muncul untuk memperbaiki pemikiran dari teori sebelumnya yang terlalu berfokus pada aspek material. Sedangkan aliran kritis muncul untuk memperbaiki kekurangan dari teori sebelumnya yang mengabaikan pada aspek non-material (Dugis, 2016: 150). Pada tulisan kali ini akan lebih membahas mengenai teori konstruktivis berbasis

identitas. Teori konstruktivis berbasis identitas ini merupakan salah satu dari berbagai macam aliran konvensional. Menurut aliran konvensional, identitas suatu aktor dalam struktur internasional dapat mempengaruhi kapabilitas serta kepentingan suatu negara (Dugis, 2016: 150). Dengan demikian, identitas ini menjadi penting karena tindakan atau keputusan suatu negara harus berdasar dan sejalan dengan identitas yang dimilikinya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan para aktor agar dapat lebih terfokus dalam menentukan serta mendefinisikan kepentingan dan keputusan tindakan suatu negara yang akan diambil.

Secara sederhana identitas dapat diartikan sebagai suatu pembeda antara satu dan yang lainnya. Selain itu, identitas juga dapat dimaknai sebagai ciri khas dari suatu aktor yang dalam hal ini bisa berupa negara. Identitas sendiri dapat dibagi kedalam dua jenis, yang pertama ialah identitas personal, yang mana identitas ini hadir akibat adanya ciri intrinsik dan juga subjektivitas dari aktor tersebut. Adapun contoh identitas personal ialah seperti agama, ras, etnis, dan lain sebagainya yang bersifat bawaan dan cenderung konsisten atau sangat sulit untuk berubah. Jenis yang kedua ialah identitas sosial. Jenis ini didapatkan oleh aktor akibat adanya suatu interaksi dengan lingkungannya ataupun aktor lainnya atau intersubjektivitas. Sehingga dengan demikian identitas sosial ini dapat berubah-ubah tergantung dari

bagaimana lingkungan melihat aktornya. Contoh dari identitas sosial ini ialah seperti ustadz yang mana peran maupun status yang didapatkannya diperoleh dari lingkungannya atau mendapat persetujuan dan diakui aktor lainnya.

Dalam menjelaskan perilaku suatu negara, Wendt membagi identitas kedalam beberapa jenis tipologi. Beberapa diantaranya ialah identitas tipe dimana identitas negara dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri yang non fisik atau yang tak kasat mata seperti kepercayaan, ideologi, dan sebagainya. Contohnya ialah Tiongkok yang dikenal sebagai negara peradaban (Rosyidin, 2020: 87). Jenis selanjutnya ialah identitas peran yang mana itu artinya peranan dari suatu negara di ranah internasional dapat menjadi identitas mereka sendiri. Contohnya seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara *peacemaker* dikarenakan peranannya di ranah internasional yang condong ke arah perdamaian. Hal tersebut menandakan identitas peran yang didapatkan oleh suatu negara tercipta karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh negara tersebut yang kemudian menjadi gambaran atau ciri dari negara tersebut yang diakui atau diberikan oleh negara lainnya.

Menilik identitas dan peran ini, dapat dilihat melalui *role theory* dalam hubungan internasional. Peran sendiri dapat diartikan sebagai posisi sosial seseorang yang dibentuk oleh dirinya sendiri dan juga

ekspektasi yang dapat merubah tujuan sang aktor di dalam suatu kelompok. Peran atau role sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu *role expectations* dan juga *role conceptions* (Sebastian Harnisch, 2011: 8). *Role expectations* dapat diartikan sebagai ekspektasi atau harapan terhadap peran suatu aktor baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Sedangkan *role conceptions* ialah peran yang memang hadir berdasarkan pemikiran atau diri sang aktor. Hal ini menandakan peran ini sangat erat kaitannya dengan karakter dan juga pembentukan identitas. Sejalan dengan pemikiran Wendt pada tahun 1999, dalam teori peran disampaikan juga bahwasanya dalam pembentukan identitas sosial didapatkan melalui perspektif aktor lainnya karena peranan yang diberikan atau cara mereka berperilaku. Oleh karenanya, identitas menurut konstruktivis sangat memiliki peranan terkait dengan bagaimana negara berperilaku yang kemudian membentuk suatu sikap atau kebijakan luar negeri termasuk dalam proses penyelesaian suatu konflik di ranah internasional.

### **1. 5.2 Diplomasi Multilateral**

Secara umum, diplomasi dapat diartikan sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui komunikasi, termasuk pada waktu negosiasi yang mengarah pada tawar-menawar atau kesepakatan (Rusdiyanta, 2022: 222). Menurut S.L. Roy (dalam Rusdiyanta, 2022:

222), diplomasi ialah negosiasi untuk mengedepankan kepentingan negara untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional secara damai yang mana ini berkaitan dengan politik luar negeri, sistem negara serta tentu siapa perwakilan negara yang diutus.

S.L Roy juga membagi diplomasi kedalam beberapa bentuk yang mana salah satunya ialah diplomasi multilateral. Menurut Berridge, diplomasi multilateral ini ialah diplomasi yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih melalui sebuah konferensi (Rusdiyanta, 2022: 230). Hadirnya diplomasi multilateral dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting bagi tatanan dunia internasional guna mengatasi berbagai permasalahan global yang sangat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwasanya diplomasi multilateral mampu mendorong dialog atau diskusi antar negara untuk mencegah terjadinya konflik atau bahkan menjadi wadah untuk mencari solusi bersama.

Pada prakteknya, diplomasi multilateral dilakukan melalui proses negosiasi antar perwakilan negara guna mengambil kesepakatan bersama terkait suatu isu yang umumnya mengganggu stabilitas, keamanan, serta pembangunan global. Diplomasi multilateral ini tentu dilakukan dalam forum-forum internasional maupun regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), ASEAN, dan lain sebagainya. Hadirnya diplomasi multilateral

ini mendorong kemudahan berdialog atau berdiplomasi antar negara dalam menyelesaikan berbagai macam isu internasional serta menjadi wadah untuk mengemukakan kepentingan nasional suatu negara di kancah internasional yang mana forumnya lebih luas lagi bagi suatu negara. Tak hanya itu, diplomasi multilateral juga hadir sebagai suatu wadah untuk negara agar dapat terlibat aktif menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai negara di dunia.

Guna memudahkan pembaca memahami alur penelitian, berikut merupakan skema untuk menggambarkan alur penelitian secara singkat.

## Bagan 1.1

## Skema Alur Penelitian



## 1. 6 Operasional Konsep

### 1. 6.1 Definisi Konsep

#### 1.6.1 1 Identitas

Identitas secara konsep dapat diartikan sebagai suatu pembeda antara aktor satu dan yang lainnya. Wendt (dalam Rusdiyanta, 2022: 109) mendefinisikan identitas sebagai atribut yang dimiliki oleh aktor internasional yang mana digunakan sebagai landasan dalam berperilaku atau mengambil suatu tindakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya konsep identitas ini merupakan suatu atribut yang diperlukan oleh

negara dalam mengambil keputusan untuk bertindak. Dalam penulisan ini, penulis akan menganalisis melalui tiga konsep identitas Indonesia yakni sebagai peacemaker, negara muslim terbanyak, dan negara yang pernah dijajah.

#### 1.6.1 2 Diplomasi Multilateral

Menurut Berridge, diplomasi multilateral ini ialah diplomasi yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih melalui sebuah konferensi (Rusdiyanta, 2022: 230). Dengan demikian maka dapat diartikan diplomasi multilateral ini ialah salah satu cara negara berdiplomasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama di tingkat internasional maupun regional. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis langkah diplomasi multilateral apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk keberpihakannya terhadap Palestina.

### **1. 6.2 Definisi Operasional**

#### 1.6.2. 1 Identitas

Identitas menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu negara dalam melihat dan memposisikan dirinya dalam berbagai hal termasuk konflik. Keikutsertaan identitas ini menjadi penting untuk melihat dan menganalisis kaitannya dengan keberpihakan yang dilakukan oleh Indonesia kepada Palestina

dalam proses penyelesaian konflik yang ada. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk melihat bagaimana identitas Indonesia yang menjadi negara muslim terbanyak dan negara yang pernah dijajah sehingga membuat Indonesia berpihak dalam suatu konflik yang berbanding terbalik khususnya dengan identitas Indonesia sebagai *peacemaker*.

#### 1.6.2. 2 Diplomasi Multilateral

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada langkah yang diambil Indonesia dalam melakukan multilateral diplomasi. Konflik Palestina dan Israel yang sangat sulit untuk diselesaikan dikarenakan masih banyaknya kekeliruan dalam meresolusi konflik yang ada. Dalam hal ini, penulis akan melihat bagaimana cara Indonesia selalu mencoba konsisten untuk berupaya dalam penyelesaian konflik ini israel-palestina. Oleh karenanya dalam hal ini penulis hendak menggunakan ini sebagai suatu landasan dalam menganalisisnya melalui identitas.

### 1. 7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini menghadirkan argumen penulis yang mana terdapat perbedaan sikap dari Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian di dalam konflik Israel-Palestina. Sehingga tak

heran bila Indonesia dikenal dengan negara peacemaker yang kemudian menjadi salah satu identitasnya di dunia internasional. Akan tetapi, dalam konflik Israel-Palestina ini, Indonesia gagal menjalankan peranannya sebagai peacemaker dan tidak bisa memenuhi syarat pihak ketiga dalam resolusi konflik sebagai pihak yang netral dan cenderung berpihak kepada Palestina. Keberpihakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam konflik Israel-Palestina tentu tak lepas dari identitas yang dimiliki oleh Indonesia yakni sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak dan negara yang pernah terjajah. Identitas ini yang kemudian menekan pergerakan Indonesia dalam politik luar negerinya sehingga Indonesia dengan sangat jelas dan tegas menyatakan sikap akan keberpihakannya terhadap Palestina.

## 1. 8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif dari aktor yang terlibat dan juga perilakunya. Menurut Creswell (2008), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan guna mengeksplorasi dan juga memahami gejala sentral dengan cara mewawancarai para partisipan dengan berbagai pertanyaan yang bersifat umum dan luas (Semiawan). Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif memaparkan beberapa pendapat para ahli diantaranya Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Mamik, 2015:3). Dengan demikian, metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang memiliki fokus penelitian yang sangat dalam ketika menganalisis khususnya ketika menggunakan asumsi dasar dan cara berpikir. Sehingga, hasil penelitian yang dihasilkan lebih komprehensif.

### **1. 8. 1 Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel (Sugeng, 2020: 28). Oleh sebab itu, tipe penelitian eksplanatif sendiri merupakan jenis penelitian yang mencoba untuk memberikan jawaban atas unsur pertanyaan mengapa suatu permasalahan terjadi. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yakni menganalisis mengapa Indonesia berpihak kepada Palestina dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel.

### **1. 8. 2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data dan juga informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan (Al-Muchtar, 2015: 243). Dalam penelitian ini sendiri, penulis akan menitikberatkan penelitian pada keberpihakan posisi Indonesia pada konflik Israel-Palestina. Penulis melakukan penelitian secara *desk*

*research* sehingga data yang diperlukan dapat dihimpun melalui jurnal, artikel, buku, portal berita, dan lainnya tanpa harus melakukan penelitian langsung ke lapangan.

### **1. 8. 3 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian atau fokus daripada penelitian merupakan suatu bentuk usaha pembatasan dalam sebuah penelitian guna mengetahui secara jelas ruang lingkup pembahasan agar penelitian tidak terlalu luas (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018:52). Oleh sebab itu, adapun fokus dari penelitian ini ialah pada analisis identitas terhadap keberpihakan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Israel-Palestina.

### **1. 8. 4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber diperoleh dari data sekunder. Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (Mamik, 2015: 73). Hal tersebut menandakan dalam pencarian data sekunder, penulis dapat menggunakan sarana media dan teknologi untuk mencari literatur guna mempermudah pendalaman pemahaman terkait dengan penelitian.

### **1. 8. 5 Jenis Data**

Jenis data merupakan hal yang penting untuk ditentukan sebelum pada akhirnya peneliti mencari suatu data untuk penelitiannya

(Mulyadi, 2012: 78). Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data sekunder seperti teks yang tertulis maupun tidak tertulis dan nyata secara fisik serta frasa yang digunakan untuk medeskripsikan objek yang diperlukan.

#### **1. 8. 6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan riset atau studi kepustakaan. Studi pustaka menurut Sarwono (2006: 26) ialah mempelajari berbagai buku-buku refrensi dan hasil penelitian lainnya. Sumber-sumber data yang digunakan akan mengacu kepada buku, jurnal, dan artikel di media massa yang terpercaya. Sedangkan untuk datanya sendiri penulis menggunakan data primer yang berasal dari pidato resmi pihak yang bersangkutan. Serta penulis juga menggunakan data sekunder.

#### **1. 8. 7 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis kongruen dimana nantinya penulis akan memvalidasi data yang didapatkan dengan argumen penulis. Sejalan dengan maknanya dimana teknik analisis kongruen ini merupakan teknik analisis yang sederhana dimana peneliti hanya mencocokkan data dan teori yang digunakan dalam penelitian (Rosyidin, 2019: 61). Hal tersebut dikarenakan

penulis merasa data yang dibutuhkan sudah cukup jelas untuk digunakan dalam memvalidasi argumen yang disampaikan oleh penulis.